

PENGARUH IMPLEMENTASI TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK YANG BAIK TERHADAP KUALITAS ANGGARAN SKPD

Firma Sulistiyowati
Universitas Sanata Dharma
firma@usd.ac.id

Abstract

The good financial management of local government related to good public governance. The good public governance will encourage the good financial statement in local government, including the quality of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) budget. The aim of this research is to investigate the influence of implementation good public governance upon the quality of SKPD budget. This research uses a quantitative approach with survey method. The data was gathered by questionnaire. The number of respondents in the research are 395 public servants (ASN) in Kabupaten/Kota/Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), including Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Kota Yogyakarta, and Pemerintah Provinsi DIY. The Technique of data analysis was used in this study is simple regression. The simple regression is a tool to analyze the effect of independent variable (implementation of good public governance) towards dependent variable (the quality of SKPD's budget). The conclusion of this research shows that the implementation of good public governance in Kabupaten/ Kota/Provinsi DIY influence the quality of SKPD budget.

Keywords: *Good Public Governance, Budget Quality*

Abstrak

Manajemen keuangan yang baik dari pemerintah daerah bergantung pada tata kelola sektor publik yang baik. Keberadaan tata kelola sektor publik yang baik mampu mendukung terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang baik, satu di antaranya adalah kualitas anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tujuan dari studi ini untuk menguji pengaruh implementasi tata kelola sektor publik yang baik terhadap terwujudnya anggaran SKPD yang berkualitas. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. 395 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi di wilayah DIY, yang meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Provinsi DIY menjadi respondennya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana dipakai untuk menganalisis pengaruh variabel independen (Tata Kelola Sektor Publik yang Baik) terhadap variabel dependen (Kualitas Anggaran SKPD). Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi tata kelola sektor publik yang baik berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD di setiap Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi di DIY.

Kata kunci: *Tata Kelola Sektor Publik yang Baik, Kualitas Anggaran*

PENDAHULUAN

Reformasi di sektor publik diawali semenjak munculnya otonomi daerah. Reformasi tersebut tidak hanya mengubah format lembaga publik, tetapi juga melakukan pembaharuan terhadap alat-alat yang mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut agar tujuan reformasi, yaitu menciptakan tata kelola sektor publik yang baik dapat tercapai (Mardiasmo, 2002: 25). Reformasi

sektor publik itu berdampak juga pada reformasi pengelolaan keuangan sektor publik, khususnya di pemerintahan. Keberadaan tata kelola sektor publik yang baik akan mendorong pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik pula.

Nurdiono (2016) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik sebab fungsi pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan berjalan dengan semestinya. Egbide dan Agbude (2012: 55) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tata kelola yang baik dengan penganggaran yang baik.

Di Indonesia tuntutan akuntabilitas publik semakin menguat, khususnya bagi lembaga-lembaga publik, termasuk di dalamnya lembaga pemerintah, untuk memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangannya. Oleh karena itu lembaga pemerintah harus semakin transparan dan akuntabel dalam menyajikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selain akuntabilitas dan transparansi, tata kelola sektor publik yang baik juga harus memenuhi asas-asas demokrasi, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan, seperti halnya yang termuat dalam KNKG (2010).

Penelitian ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena tata kelola sektor publik yang baik akan mempengaruhi penganggaran yang baik. Riset ini ingin menguji apakah penerapan tata kelola sektor publik yang baik mampu mendorong terwujudnya anggaran SKPD yang berkualitas, yang merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya di pemerintah kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah propinsi DIY dan di pemerintahan propinsi DIY itu sendiri. Kualitas anggaran SKPD tersebut diukur berdasarkan beberapa asas, meliputi asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan.

Pertanyaan yang akan dijawab dalam riset ini adalah bagaimana pengaruh implementasi tata kelola sektor publik yang baik terhadap kualitas anggaran SKPD di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, dan Provinsi DIY? Tujuan dari penelitian ini untuk menginvestigasi pengaruh implementasi tata kelola sektor publik yang baik terhadap kualitas anggaran SKPD di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, dan Provinsi DIY.

KERANGKA TEORETIS YANG DIPAKAI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini didasarkan pada teori *goal setting* (Locke, 1981). Teori *goal setting* menjelaskan hubungan antara tujuan organisasi dan kinerja yang dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan merupakan cara yang baik untuk pencapaian dan tetap termotivasi (Ghozali, 2000: 36). Organisasi yang mengimplementasikan tata kelola yang baik diharapkan akan menghasilkan anggaran yang berkualitas karena prinsip-prinsip yang baik yang tercakup dalam tata kelola yang baik mampu mendorong kinerja pegawai dalam mewujudkan anggaran unit yang berkualitas.

Tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) merupakan cara-cara baik organisasi dalam mengelola urusan-urusannya. Tata kelola organisasi yang baik menurut Bank Dunia adalah cara negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pengembangan masyarakat. Sementara itu, UNDP (*United Nation Development Program*) mendefinisikan tata kelola sebagai pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara dalam segala tingkatan. Karakteristik tata kelola yang baik menurut UNDP meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsif, orientasi konsensus, kesamaan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategik (Madiasmo, 2002: 23).

Tata kelola sektor publik yang baik diatur dalam KNKG 2008, yang meliputi lima asas, yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Prinsip dasar dari asas demokrasi adalah partisipasi, pengakuan perbedaan pendapat, dan perwujudan kepentingan umum. Transparansi berprinsip dasar pada pengungkapan dan penyediaan informasi

yang memadai. Akuntabilitas berprinsip dasar pada kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.

Sementara budaya hukum memiliki prinsip penegakan hukum secara tegas dan ketataatan terhadap hukum oleh masyarakat. Pedoman pelaksanaan asas ini meliputi penyusunan serta penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Hal ini dilakukan secara terkoordinasi dengan mengedepankan asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan HAM. Asas terakhir adalah kewajaran dan kesetaraan. Asas tersebut berprinsip dasar pada keadilan dan kejujuran untuk mewujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggung jawab. Pedoman pelaksanaan asas ini adalah lembaga negara memiliki kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik dengan mengutamakan dan melindungi hak masyarakat yang berbasis kewajaran dan kesetaraan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola sektor publik yang baik dibutuhkan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik, salah satunya adalah reformasi keuangan daerah. Terdapat beberapa dimensi terkait reformasi keuangan daerah. Pertama; adanya perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan. Kedua; terkait perubahan prinsip pengelolaan anggaran; Ketiga; terjadinya perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan defisit pembelanjaan. Keempat; adanya perubahan strategi pembiayaan. Selanjutnya perlu dilaksanakan reformasi lanjutan terkait sistem pengelolaan keuangan pemda, antara lain mencakup reformasi dari berbagai sistem, seperti pembiayaan, penganggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan manajemen keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dengan tujuan untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja manajerial maupun kinerja organisasional. Laporan keuangan pemerintah daerah bermanfaat untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek bagi unit-unit pemerintah, serta mampu memprediksi kondisi ekonomi dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam unit-unit tersebut. Laporan keuangan pemerintah daerah juga ditujukan untuk mampu memonitor kinerja, kesesuaiannya terhadap peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, serta ketentuan lain yang disyaratkan. Laporan keuangan juga memuat informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta kepemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi. Informasi tentang evaluasi kinerja manajerial dan organisasional juga tercakup dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Di sektor publik, penganggaran merupakan kegiatan yang sangat penting. Proses penganggaran diawali dari tahap perencanaan, ratifikasi, implementasi, pelaporan dan evaluasi. Proses kegiatan penganggaran tersebut menghasilkan anggaran. Mahsun, Sulistiyowati, dan Purwanugraha (2011) menyatakan bahwa "anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter". Rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu unit dalam organisasi dinyatakan dalam anggaran. Oleh karena itu anggaran perlu disusun secara jelas, terarah, mendukung, dan bermanfaat bagi pencapaian tujuan unit maupun organisasi secara keseluruhan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat dalam pemerintah daerah yang bertindak sebagai pelaksana fungsi eksekutif serta memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran, berkoordinasi, dan mempertanggungjawabkannya kepada pihak eksekutif (kepala daerah) agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Pembentukan SKPD diatur oleh pemerintah dalam pasal 120 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Unit-unit yang tercakup dalam SKPD antara lain adalah Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, termasuk di dalamnya Kecamatan dan

Kelurahan. Pengertian tentang Perangkat Daerah juga diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 23. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tersebut, khususnya pada pasal 232 ayat 1, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Suatu anggaran dikatakan berkualitas jika anggaran tersebut dialokasikan berdasarkan program dan kegiatan yang sesuai dengan skala prioritas yang direncanakan dan bermanfaat bagi pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing unit dalam organisasi. Anggaran SKPD yang berkualitas akan terwujud jika anggaran masing-masing SKPD tersebut disusun secara jelas dan memiliki sasaran dan manfaat, sehingga program-program yang terencana dapat terlaksana dengan baik. Kriteria anggaran yang baik menurut Egbide dan Agbude (2012: 50) adalah; (1) stabil dan mempunyai posisi fiskal berkelanjutan untuk jangka menengah dan seterusnya; (2) memfasilitasi perpindahan sumber daya dengan penggunaan yang lebih efektif dan prioritas yang lebih tinggi; (3) mampu mendorong unit-unit pengeluaran untuk beroperasi secara efisien; (4) dapat diakses publik dan mampu merespon kepentingan mereka; serta (5) mampu menjamin akuntabilitas pengeluaran uang publik.

Tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik karena fungsi pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan berjalan dengan semestinya (Nurdiono, 2016). Demikian juga menurut Egbide dan Agbude (2012: 55) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tata kelola yang baik dengan penganggaran yang baik. Penganggaran yang baik tidak akan tercapai tanpa adanya tata kelola yang baik karena tata kelola yang baik merupakan dasar untuk pencapaian penganggaran yang baik. Oleh karena itu terdapat hubungan antara tata kelola sektor publik yang baik dengan kualitas anggaran SKPD dalam Pemerintah Daerah. Implementasi tata kelola yang baik dalam pemerintahan daerah akan mempengaruhi kualitas anggaran SKPD.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, hipotesis yang akan dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Ha: Implementasi tata kelola sektor publik yang baik berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Survei dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Subjek atau responden dalam studi ini adalah Aparat Sipil Negara (ASN) yang bertugas di setiap SKPD di Pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi di wilayah DIY, yaitu di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY. Responden dalam penelitian ini berjumlah 395 orang.

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan convenience sampling, yaitu pegawai yang ditemui pada saat kuesioner dibagikan di empat kabupaten (Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul), Kota Yogyakarta, dan Provinsi DIY.

Instrumen penelitian dimodifikasi dari penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan prinsip Good Public Governance (GPG) yang diatur oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2008 untuk variabel independen Tata Kelola Sektor Publik yang Baik. Jumlah indikator pernyataan untuk mengukur variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik (GPG) terdiri dari 5 pernyataan. Sementara variabel dependen Kualitas Anggaran SKPD diadopsi dari Manik (2009) dalam Marpaung (2016), serta Octariani, Akram, dan Animah (2017), yang terdiri dari delapan pernyataan. Pernyataan untuk mengukur Tata Kelola Sektor Publik yang Baik dan Kualitas Anggaran SKPD akan dijawab dengan memilih salah satu jawaban yang berskala Likert 5 poin.

Data penelitian diolah menggunakan regresi sederhana karena hanya terdapat dua variabel yang diteliti dalam studi ini, yaitu variabel independen Tata Kelola Sektor Publik yang Baik dan variabel dependen Kualitas Anggaran SKPD. Regresi sederhana digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh penerapan tata kelola sektor publik yang baik dalam mewujudkan anggaran SKPD yang berkualitas. Sebelum melakukan analisis regresi sederhana, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian untuk masing-masing variabel. Setelah itu dilakukan pengujian hipotesis penelitian untuk setiap pemerintah daerah yang ada di DIY.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai negeri sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Provinsi DIY yang bertugas maupun ikut serta dalam penyusunan anggaran di masing-masing SKPD. Tabel di bawah ini menyajikan rincian data responden.

Tabel 1. Rincian Data Responden

No	Asal Pemerintah Daerah	Jumlah Responden
1.	Kabupaten Sleman	36 orang
2.	Kabupaten Bantul	92 orang
3.	Kabupaten Kulon Progo	73 orang
4.	Kabupaten Gunung Kidul	42 orang
5.	Kota Yogyakarta	63 orang
6.	Provinsi DIY	89 orang
	Total responden	395 orang

Sumber: data primer diolah, 2021

Data karakteristik responden meliputi nama institusi di masing-masing pemerintah daerah, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jabatan dan lama bekerja. Karakteristik data responden tersebut tidak dapat dianalisis secara mendalam karena tidak semua responden mengisi biodata. Oleh karena itu, studi ini hanya akan menganalisis secara umum terkait karakteristik data responden berdasarkan biodata yang diisi oleh masing-masing responden.

Data karakteristik responden seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jabatan, dan lama bekerja seharusnya dapat menjadi variabel kontrol yang akan melengkapi penelitian ini, jika responden mengisi biodata tersebut secara lengkap. Namun dalam studi ini, tidak semua responden mengisi biodata secara lengkap sehingga data karakteristik responden tersebut tidak bisa dijadikan sebagai variabel kontrol.

Di Kabupaten Sleman, responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 36 orang dengan 19 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang berjenis kelamin perempuan, dan satu orang tidak mengisi jenis kelaminnya. Usia responden di Kabupaten Sleman, yang termuda berusia 30 tahun dan yang paling tua berusia 57 tahun. Tingkat pendidikan responden di Kabupaten Sleman terdiri dari 18 orang berpendidikan S1, 4 orang berpendidikan S2, 9 orang berpendidikan Diploma, dan 5 orang berpendidikan SMA/SMK. Sebagian besar berjabatan staf (23 orang), sedangkan sisanya berjabatan Kasubag (2 orang), Kasi (1 orang), Bendahara (2 orang), Pembuku (1 orang), Pengelola Keuangan (2 orang), lain-lain (3 orang), 2 orang tidak mengisi jabatan. Responden dari Kabupaten Sleman yang paling lama telah bekerja selama 32 tahun, dan yang paling baru bekerja kurang dari 1 tahun. Satu orang tidak mengisi lama bekerja.

Responden di Kabupaten Bantul berjumlah 92 orang. Namun hanya 58 orang yang mengisi biodata secara lengkap. Sedangkan 33 orang responden tidak mengisi biodata dengan lengkap,

bahkan ada yang tidak mengisi sama sekali. Jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki adalah 40 orang, jumlah perempuan 35 orang, dan yang tidak mengisi jenis kelaminnya 17 orang. Usia responden paling tua berumur 57 tahun dan yang paling muda berusia 23 tahun. Tingkat pendidikan S1 masih menjadi mayoritas responden (40 orang). Responden yang berpendidikan SMA/SMK (14 orang), Diploma (9 orang), S2 (9 orang), sisanya (20 orang) tidak menuliskan tingkat pendidikannya. Jabatan responden terdiri dari staf (30 orang), Kasubag (7 orang), Analis (5 orang), Kabid (2 orang), (Kasubid (2 orang), Kepala Seksi (2 orang), Bendahara (2 orang), Pembantu Bendahara (1 orang), Penyusun Data (1 orang), Administrasi Keuangan (1 orang), Administrasi Barang (1 orang), Subbag Kas Aset (1 orang), 27 orang lainnya tidak mengisi jabatannya. Lama bekerja responden paling lama 35 tahun dan paling baru telah bekerja selama 6 bulan.

Responden di Kabupaten Kulonprogo berjumlah 73 orang. Namun semua responden tidak mengisi biodata. Mereka hanya mengisi asal institusi, yaitu dari DPu (3 orang), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (5 orang), DLH (5 orang), DP3A (5 orang), Bappeda (3 orang), DPMDP2KB (5 orang), Dinas koperasi (4 orang), Dinas Perdagangan (5 orang), Dinas Perhubungan (5 orang), Dinas Kelautan dan Perikanan (5 orang), DPMPT (5 orang), Dinas Komunikasi (2 orang), BKAD (5 orang), Satpol PP (5 orang), Dinpar (5 orang), Inspektorat (1 orang), dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (5 orang).

Jumlah responden di Kabupaten Gunungkidul 42 orang dengan jumlah perempuan 27 orang dan jumlah laki-laki 14 orang, dan satu orang tidak mencantumkan jenis kelaminnya. Usia responden paling muda 23 tahun, dan paling tua berusia 58 tahun. Mayoritas tingkat pendidikan responden adalah S1 (27 orang). Responden lainnya berpendidikan S2 (6 orang), Diploma (5 orang), SMA/SMK (4 orang). Jabatan responden terdiri dari Kasubag (11 orang), Staf (10 orang), Bendahara (4 orang), Auditor Madaya (2 orang), Pengelola (2 orang), Pelaksana (2 orang), Lain-lain (9 orang). Lama bekerja responden terlama 36 tahun dan yang paling baru telah bekerja selama 0,5 tahun.

Responden di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam studi ini berjumlah 63 orang. 54 orang mengisi biodata dengan lengkap, dan sisanya 9 orang tidak mengisinya dengan lengkap. Jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan ada 32 orang, laki-laki 27 orang, dan yang tidak mengisi jenis kelamin berjumlah 4 orang. Usia responden paling tua 57 tahun dan yang paling muda berusia 26 orang. Dari 63 orang responden yang tidak mengisi usia berjumlah 5 orang. Tingkat pendidikan paling banyak adalah S1 (26 orang), SMA/SMK (14 orang), Diploma (10 orang), dan 6 orang berpendidikan S2. Sisanya sejumlah 7 orang tidak mengisi tingkat pendidikannya. Sebagian besar responden di Pemkot Yogyakarta berjabatan sebagai staf (16 orang), Pengelola (5 orang), Verifikator (5 orang), Bendahara (7 orang), Kasubag (9 orang), Analis (4 orang), Akuntansi (2 orang), Pengadministrasi (2 orang), Perencanaan (1 orang), sisanya 12 orang tidak mengisi tentang jabatannya. Lama bekerja responden yang paling lama 36 tahun, dan yang paling baru telah bekerja selama 0,8 tahun.

Di Provinsi DIY jumlah responden 89 orang, dengan jumlah laki-laki 36 orang dan jumlah perempuan 43 orang. Mereka berasal dari berbagai institusi, yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (1 orang), DLHK (1 orang), Dinas Kebudayaan (1 orang), Dinpar (1 orang), Biro Organisasi (1 orang), BPKA (5 orang), Dishub (5 orang), DP3AP2 (4 orang), Dinas PUP-ESDM (4 orang), Dinsos (4 orang), Dispertaru (1 orang), Diskominfo (5 orang), Biro Tata Pemerintahan (5 orang), Disnakertrans (5 orang), Badan Kepegawaian Daerah (5 orang), DPAD (4 orang), Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY (5 orang), Biro Umum Humas dan Protokol Setda (5 orang), Bappeda (5 orang), Paniradya Keistimewaan (5 orang), Biro Bina Mental Spiritual (5 orang), Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (1 orang), Biro Bina Bernas (4 orang), Dinas Dikpora (5 orang), Biro Hukum (5 orang).

Responden tertua berusia 56 tahun dan termuda berusia 24 tahun. Mayoritas responden berpendidikan S1 (41 orang), S2 (25 orang), SMA/SMK (14 orang), Diploma (9 orang), dan tiga orang responden tidak mengisi tingkat pendidikannya. Responden yang berjabatan Bendahara (4 orang), Staf (33 orang), Kabag (2 orang), Penyusun Anggaran (4 orang), Kasubbag (9 orang), Pengurus barang (1 orang), Subbag (4 orang), Sekretaris (1 orang), Pengelola Akuntansi (2 orang), Penyiap Gaji (1 orang), Akuntansi (1 orang), Keuangan (3 orang), Pranata Komputer (2 orang), analis (3 orang), Program (1 orang), Verifikator Data laporan Keuangan (1 orang), Pengelolaan SD perekonomian (1 orang), Perencana (1 orang), Kabid (1 orang), Fungsional (1 orang), Pelaksana (1 orang), Pranata Kearsipan Subbag Umum (1 orang), Adm. Persuratan (1 orang), lain-lain (3 orang), 7 orang responden tidak mengisi jabatannya. Lama bekerja responden paling lama 35 tahun, dan paling baru 1 tahun. Setelah mendeskripsikan data karakteristik responden, tabel-tabel berikut ini akan menyajikan hasil uji validitas dan reliabilitas serta hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi sederhana di setiap Kabupaten/Kota/Provinsi di DIY.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik (GPG) di Kabupaten Sleman

No	R hitung	R tabel	Signifikansi	Keabsahan
1	0,725	0,329	0,0000	Absah
2	0,730	0,329	0,0000	Absah
3	0,830	0,329	0,0000	Absah
4	0,709	0,329	0,0000	Absah
5	0,791	0,329	0,0000	Absah

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian validitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik di Kabupaten Sleman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan nilai signifikansi semuanya 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa lima indikator pernyataan tentang variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik tersebut valid atau absah, yang berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Sleman

No	R hitung	R tabel	Signifikansi	Keabsahan
1	0,595	0,329	0,0000	Absah
2	0,724	0,329	0,0000	Absah
3	0,783	0,329	0,0000	Absah
4	0,694	0,329	0,0000	Absah
5	0,652	0,329	0,0000	Absah
6	0,767	0,329	0,0000	Absah
7	0,685	0,329	0,0000	Absah
8	0,767	0,329	0,0000	Absah

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian validitas variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Sleman pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan nilai signifikansi 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa delapan indikator pernyataan tentang variabel Kualitas Anggaran SKPD tersebut valid atau absah, yang berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas di Kabupaten Sleman

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tata Kelola Sektor Publik yang Baik	0,786	Reliabilitas tinggi

Kualitas Anggaran SKPD	0,854	Reliabilitas sangat tinggi
------------------------	-------	----------------------------

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian reliabilitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik dan Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Sleman pada Tabel 4 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha untuk Tata Kelola Sektor publik yang Baik lebih besar dari 0,7 yang berarti reliabilitas tinggi. Sementara itu untuk variabel Kualitas Anggaran SKPD, memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,8, yang berarti bahwa seluruh indikator pernyataan reliabel dan secara konsisten memiliki reliabilitas yang sangat tinggi.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Kelola Sektor Publik yang Baik (GPG) di Kabupaten Bantul

No	R hitung	R tabel	Signifikansi	Keabsahan
1	0,811	0,2050	0,0000	Absah
2	0,751	0,2050	0,0000	Absah
3	0,655	0,2050	0,0000	Absah
4	0,718	0,2050	0,0000	Absah
5	0,621	0,2050	0,0000	Absah

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian validitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik di Kabupaten Bantul pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan nilai signifikansi semuanya 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa lima indikator pernyataan tentang variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik tersebut valid atau absah, yang berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Bantul

No	R hitung	R tabel	Signifikansi	Keabsahan
1	0,695	0,2050	0,0000	Absah
2	0,596	0,2050	0,0000	Absah
3	0,647	0,2050	0,0000	Absah
4	0,671	0,2050	0,0000	Absah
5	0,747	0,2050	0,0000	Absah
6	0,788	0,2050	0,0000	Absah
7	0,746	0,2050	0,0000	Absah
8	0,751	0,2050	0,0000	Absah

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian validitas variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Bantul pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan nilai signifikansi 0,0000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa delapan indikator pernyataan tentang variabel Kualitas Anggaran SKPD tersebut valid atau absah, yang berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas di Kabupaten Bantul

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tata Kelola Sektor publik yang Baik	0,752	Reliabilitas tinggi
Kualitas Anggaran SKPD	0,855	Reliabilitas sangat tinggi

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian reliabilitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik dan Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Bantul pada Tabel 7 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha untuk Tata Kelola Sektor publik yang Baik lebih besar dari 0,7 yang berarti reliabilitas tinggi. Sementara itu untuk variabel Kualitas Anggaran SKPD, memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,8, yang berarti bahwa seluruh indikator pernyataan reliabel dan secara konsisten memiliki reliabilitas yang sangat tinggi.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik (GPG) di Kabupaten Kulonprogo

No	R hitung	R tabel	Signifikansi	Keabsahan
1	0,663	0,2303	0,0000	Absah
2	0,824	0,2303	0,0000	Absah
3	0,810	0,2303	0,0000	Absah
4	0,802	0,2303	0,0000	Absah
5	0,708	0,2303	0,0000	Absah

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian validitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik di Kabupaten Kulonprogo pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan nilai signifikansi semuanya 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa lima indikator pernyataan tentang variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik tersebut valid atau absah, yang berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Kulonprogo

No	R hitung	R tabel	Signifikansi	Keabsahan
1	0,786	0,2303	0,0000	Absah
2	0,892	0,2303	0,0000	Absah
3	0,755	0,2303	0,0000	Absah
4	0,718	0,2303	0,0000	Absah
5	0,607	0,2303	0,0000	Absah
6	0,749	0,2303	0,0000	Absah
7	0,882	0,2303	0,0000	Absah
8	0,750	0,2303	0,0000	Absah

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian validitas variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Kulonprogo pada Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa delapan indikator pernyataan tentang variabel Kualitas Anggaran SKPD tersebut valid atau absah, yang berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas di Kabupaten Kulonprogo

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tata Kelola Sektor Publik yang Baik	0,817	Reliabilitas sangat tinggi
Kualitas Anggaran SKPD	0,899	Reliabilitas sangat tinggi

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian reliabilitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik dan Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Kulonprogo pada Tabel 10 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,8. Hal tersebut menyatakan bahwa indikator pernyataan untuk mengukur

kedua variabel tersebut dapat diandalkan atau memiliki reliabilitas yang sangat tinggi dan akan konsisten jika pengukuran tersebut diulang.

Tabel 11. Hasil Uji Validitas Variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik (GPG) di Kabupaten Gunung Kidul

No	R hitung	R tabel	Signifikansi	Keabsahan
1	0,704	0,3044	0,0000	Absah
2	0,708	0,3044	0,0000	Absah
3	0,719	0,3044	0,0000	Absah
4	0,516	0,3044	0,0000	Absah
5	0,503	0,3044	0,0000	Absah

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian validitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik di Kabupaten Gunung Kidul pada Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan nilai signifikansi semuanya 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa lima indikator pernyataan tentang variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik tersebut valid atau absah, yang berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Tabel 12. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Gunung Kidul

No	R hitung	R tabel	Signifikansi	Keabsahan
1	0,756	0,3044	0,0000	Absah
2	0,778	0,3044	0,0000	Absah
3	0,561	0,3044	0,0000	Absah
4	0,644	0,3044	0,0000	Absah
5	0,682	0,3044	0,0000	Absah
6	0,699	0,3044	0,0000	Absah
7	0,662	0,3044	0,0000	Absah
8	0,824	0,3044	0,0000	Absah

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian validitas variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Gunung Kidul pada Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan nilai signifikansi semuanya 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa delapan indikator pernyataan tentang variabel Kualitas Anggaran SKPD tersebut valid atau absah, yang berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas di Kabupaten Gunung Kidul

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tata Kelola Sektor Publik yang Baik	0,604	Reliabilitas tinggi
Kualitas Anggaran SKPD	0,850	Reliabilitas sangat tinggi

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian reliabilitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik dan Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Gunung Kidul pada Tabel 13 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha untuk Tata Kelola Sektor publik yang Baik lebih besar dari 0,6 yang berarti reliabilitas tinggi. Sementara itu untuk variabel Kualitas Anggaran SKPD, memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,8 yang berarti bahwa seluruh indikator pernyataan reliabel dan secara konsisten memiliki reliabilitas yang sangat tinggi.

Tabel 14. Hasil Uji Validitas Variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik (GPG) di Kota Yogyakarta

No	R hitung	R tabel	Signifikansi	Keabsahan
1	0,624	0,2480	0,0000	Absah
2	0,671	0,2480	0,0000	Absah
3	0,641	0,2480	0,0000	Absah
4	0,706	0,2480	0,0000	Absah
5	0,843	0,2480	0,0000	Absah

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian validitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik di Kota Yogyakarta pada Tabel 14 menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan nilai signifikansi semuanya 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa lima indikator pernyataan tentang variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik tersebut valid atau absah, yang berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Tabel 15. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kota Yogyakarta

No	R hitung	R tabel	Signifikansi	Keabsahan
1	0,831	0,2480	0,0000	Absah
2	0,779	0,2480	0,0000	Absah
3	0,500	0,2480	0,0000	Absah
4	0,713	0,2480	0,0000	Absah
5	0,696	0,2480	0,0000	Absah
6	0,675	0,2480	0,0000	Absah
7	0,755	0,2480	0,0000	Absah
8	0,824	0,2480	0,0000	Absah

Sumber: pengolahan primary data, 2022

Hasil pengujian validitas variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kota Yogyakarta pada Tabel 15 menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan nilai signifikansi semuanya 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa delapan indikator pernyataan tentang variabel Kualitas Anggaran SKPD tersebut valid atau absah, yang berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Tabel 16. Hasil Uji Reliabilitas di Kota Yogyakarta

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tata Kelola Sektor Publik yang Baik	0,739	Reliabilitas tinggi
Kualitas Anggaran SKPD	0,869	Reliabilitas sangat tinggi

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian reliabilitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik dan Kualitas Anggaran SKPD di Kota Yogyakarta pada Tabel 16 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha untuk Tata Kelola Sektor Publik yang Baik lebih besar dari 0,7 yang berarti reliabilitas tinggi. Sementara itu untuk variabel Kualitas Anggaran SKPD, memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,8, yang berarti bahwa seluruh indikator pernyataan reliabel dan secara konsisten memiliki reliabilitas yang sangat tinggi.

Tabel 17. Hasil Uji Validitas Variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik (GPG) di Provinsi DIY

No	R hitung	R tabel	Signifikansi	Keabsahan
1	0,502	0,1750	0,0000	Absah
2	0,699	0,1750	0,0000	Absah
3	0,638	0,1750	0,0000	Absah
4	0,643	0,1750	0,0000	Absah
5	0,703	0,1750	0,0000	Absah

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian validitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik di Provinsi DIY pada Tabel 17 menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan nilai signifikansi semuanya 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa lima indikator pernyataan tentang variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik tersebut valid atau absah, yang berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Tabel 18. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Anggaran SKPD di Provinsi DIY

No	R hitung	R tabel	Signifikansi	Keabsahan
1	0,454	0,1750	0,0000	Absah
2	0,660	0,1750	0,0000	Absah
3	0,489	0,1750	0,0000	Absah
4	0,642	0,1750	0,0000	Absah
5	0,659	0,1750	0,0000	Absah
6	0,694	0,1750	0,0000	Absah
7	0,631	0,1750	0,0000	Absah
8	0,803	0,1750	0,0000	Absah

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian validitas variabel Kualitas Anggaran SKPD di Provinsi DIY pada Tabel 18 menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan nilai signifikansi semuanya 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa delapan indikator pernyataan tentang variabel Kualitas Anggaran SKPD tersebut valid atau absah, yang berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Tabel 19. Hasil Uji Reliabilitas di Provinsi DIY

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tata Kelola Sektor Publik yang Baik	0,588	Reliabilitas sedang
Kualitas Anggaran SKPD	0,766	Reliabilitas tinggi

Sumber: pengolahan primary data, 2021

Hasil pengujian reliabilitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik dan Kualitas Anggaran SKPD di Provinsi DIY pada Tabel 19 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha untuk Tata Kelola Sektor publik yang Baik lebih besar dari 0,5 yang berarti reliabilitas sedang. Sementara itu untuk variabel Kualitas Anggaran SKPD, memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,7 yang berarti bahwa seluruh indikator pernyataan reliabel dan secara konsisten memiliki reliabilitas yang tinggi.

Tabel 20. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana di Kabupaten Sleman

Model	Koefisien Tidak terstandarisasi		Koefisien Terstandarisasi	t	Signifikansi
	B	Kesalahan Standar	Beta		
(Konstan)	14,751	2,442		6,041	0,000
GPG	0,923	0,119	0,799	7,736	0,000

Sumber: pengolahan primary data, 2021

$$t \text{ tabel} = 0,05/2; n-k-1 = 0,05/2; 36-1-1 = 0,025; 2,03224$$

Hasil pengujian regresi yang tersaji pada Tabel 20 menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola sektor publik yang baik berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD di pemerintah Kabupaten Sleman.

Tabel 21. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana di Kabupaten Bantul

Model	Koefisien Tidak terstandarisasi		Koefisien Terstandarisasi	t	Signifikansi
	B	Kesalahan Standar	Beta		
(Konstan)	17,056	2,396		7,120	0,000
GPG	0,786	0,114	0,587	6,871	0,000

Sumber: pengolahan primary data, 2021

$$t \text{ tabel} = 0,05/2; n-k-1 = 0,05/2; 92-1-1 = 0,025; 1,98667$$

Hasil pengujian regresi yang tersaji pada Tabel 21 menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola sektor publik yang baik berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD di pemerintah Kabupaten Bantul.

Tabel 22. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana di Kabupaten Kulonprogo

Model	Koefisien Tidak terstandarisasi		Koefisien Terstandarisasi	t	Signifikansi
	B	Kesalahan Standar	Beta		
(Konstan)	9,179	2,215		4,144	0,000
GPG	1,201	0,105	0,806	11,459	0,000

Sumber: pengolahan primary data, 2021

$$t \text{ tabel} = 0,05/2; n-k-1 = 0,05/2; 73-1-1 = 0,025; 1,99394$$

Hasil pengujian regresi yang tersaji pada Tabel 22 menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola sektor publik yang baik berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD di pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 23. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana di Kabupaten Gunung Kidul

Model	Koefisien Tidak terstandarisasi		Koefisien Terstandarisasi	t	Signifikansi
	B	Kesalahan Standar	Beta		
(Konstan)	11,610	3,723		3,118	0,003

GPG	1,052	0,176	0,687	5,977	0,000
-----	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: pengolahan primary data, 2021

$t_{tabel} = 0,05/2$; $n-k-1 = 0,05/2$; $42-1-1 = 0,025$; 2,02108

Hasil pengujian regresi yang tersaji pada Tabel 23 menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola sektor publik yang baik berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

Tabel 24. Hasil Analisis Regresi Llinier Sederhana di Kota Yogyakarta

Model	Koefisien Tidak terstandarisasi		Koefisien Terstandarisasi	t	Signifikansi
	B	Kesalahan Standar	Beta		
(Konstan)	6,544	2,276		2,875	0,006
GPG	1,319	0,108	0,843	12,226	0,000

Sumber: pengolahan primary data, 2021

$t_{tabel} = 0,05/2$; $n-k-1 = 0,05/2$; $63-1-1 = 0,025$; 1,99962

Hasil pengujian regresi yang tersaji pada Tabel 24 menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola sektor publik yang baik berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD di pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel 25. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Provinsi DIY

Model	Koefisien Tidak terstandarisasi		Koefisien Terstandarisasi	t	Signifikansi
	B	Kesalahan Standar	Beta		
(Konstan)	19,426	1,734		11,203	0,000
GPG	0,708	0,084	0,605	8,389	0,000

Sumber: pengolahan primary data, 2021

$t_{tabel} = 0,05/2$; $n-k-1 = 0,05/2$; $89-1-1 = 0,025$; 1,98761

Hasil pengujian regresi yang tersaji pada Tabel 25 menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola sektor publik yang baik berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD di pemerintah Provinsi DIY.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dianalisis dengan menggunakan analisis

regresi sederhana untuk masing-masing pemerintah daerah, diperoleh hasil bahwa hipotesis dalam riset ini terdukung. Hasil analisis regresi di semua pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi di lingkungan DIY menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, berarti bahwa tata kelola sektor publik yang baik berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD.

Hasil penelitian ini mendukung teori *goal setting* (Locke, 1981), yang menjelaskan tentang hubungan antara tujuan organisasi dan kinerja yang dicapai berlandaskan tujuan yang telah ditetapkan. Temuan dalam studi ini juga mendukung pernyataan dari Egbide dan Agbude (2012: 55) yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara tata kelola yang baik dengan penganggaran yang baik. Tata kelola yang baik yang diterapkan oleh organisasi diharapkan mampu menghasilkan anggaran yang berkualitas karena prinsip-prinsip yang baik yang tercakup dalam tata kelola yang baik tersebut mampu mendorong kinerja pegawai dalam mewujudkan

anggaran unit yang berkualitas. Demikian juga, anggaran SKPD yang berkualitas akan terwujud jika SKPD tersebut mengimplementasikan asas-asas tata kelola sektor publik yang baik, yang meliputi demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Hasil penelitian ini mendukung riset sebelumnya yang telah dilakukan oleh Octariani, Akram, dan Aminah (2017). Temuan dalam studi ini juga mengkonfirmasi temuan studi dari Ronanda dan Sulistiyowati (2020) dan memperluas cakupan penelitian sebelumnya yang hanya dilakukan di satu pemerintah daerah saja, yaitu di Pemerintah Kota Yogyakarta.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi tata kelola sektor publik yang baik berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD di Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi di lingkungan DIY, baik itu di Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Kota Yogyakarta, maupun di Pemerintah Provinsi DIY. Penerapan tata kelola sektor publik yang baik, yang meliputi asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan mampu mendorong terwujudnya anggaran SKPD yang berkualitas.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi penelitian ini dengan melakukan studi pada cakupan daerah yang lebih luas untuk memperoleh hasil studi yang lebih komprehensif mengenai hal terkait. Analisis dapat diperluas dengan melibatkan variabel kontrol, yang tidak dapat dilakukan dalam penelitian ini, karena ketidaklengkapan biodata responden yang diperoleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Egbide, Ben-Caleb dan Godwyns Ade Agbude. 2014. *Good Budgeting and Good Governance: A Comparative Discourse*.
- Ghozali, Imam. 2020. *Grand Theory: 25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis*. Semarang. Penerbit: Yoga Pratama.
- KNKG. 2008. *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*.
- Locke, E. A., L.M., Saari, K.N. Shaw, G.P. Latham. 1981. *Goal Setting and Task Performance: 1969-1980. Psychological Bulletin, Vol. 90, No. 1., 125-152*.
- Lukviarman, Niki. 2016. *Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implentasi di Indonesia*. Solo. Penerbit: PT Era Adicitra Intermedia.
- Mahsun, Mohammad; Firma Sulistiyowati; dan Herbertus Andre Purwanugraha. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. Penerbit: BPFE
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit: ANDI.
- Nurdiono. 2016. *Tata Kelola dan Peran Akuntan dalam Mewujudkan Kualitas LKPD*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Octariani, Devie; Akram; dan Animah. 2017. *Good Governance, Performance Based Budgeting, dan SKPD Budget Quality (The case of A Structural Model Approach)*. 2017. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 21, No. 2*.
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Ronanda, Fransisca Hapsari Cahyani dan Firma Sulistiyowati. 2020. *Good Government Governance dan Kualitas Anggaran*. 2020. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas, Vol. 3, No. 1, hal. 50-68*.
- Sekaran, Uma. S dan Rojer. J. Bougie. 2016. *Research Method for Business: A Skill-Building Approach*. Seventh Edition. John Wiley & Sons Ltd.
- Undang-Undang No. 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wahyuni, Sri dan Jogiyanto Hartono. 2019. Akuntansi Keperilakuan Pengantar. Yogyakarta.
Penerbit: UPP STIM YKPN.